**ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MELALUI MUSREMBANG KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**ALI SADIKIN**

**15.11.1001.3509.091**

H. Marsuq, S.Sos. M.Si dan Jamiah, S.Sos, M.Si

Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui Isu-Isu Strategis Pembangunan Partisipatif Melalui Musrembang Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi dengan melakukan pengumpulan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara actual kondisi masyarakat yang memerlukan pembangunan fisik untuk diproritaskan dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Bengkal. Dari sisi urgensi, terdapat prioritas dalam pembangunan di Kecamatan Muara Bengkal yang dinilai memiliki urgensi terutama yang terkait dengan sarana umum seperti sarana kesehatan, jaringan air, listrik, jalan, jembatan, dan balai pertemuan memilik iurgensi dalam pembangunan desa. Selanjutnyadariindikatorrelevansimenunjukkanisupembangunan yang diaspirasikanmemilikikesesuaiandenganprioritaspembangunandesa di KecamatanMuaraBengkal. Kemudiandampakpositif yang dapatdicermatiyaitumasyarakatdapatdilibatkandalam proses perencanaanpembangunan di Desasehinggaterbangunkepercayaanantarapemerintah dan masyarakatnamuntidakdapatdipungkiribahwaadaketidakpuasansejumlahpihak. Pada indikatorkesesuaianvisimisimenunjukkanketerlibatansejumlah OPD atau SKPD merupakanupayapemerintahdaerahdalammenyelaraskanvisimisikabupatendalampenyelenggaraanMusrembang di KecamatanMuaraBengkal SKPD yang terlibatmengontrolrealisasidariperencanaanpembangunan di KecamatanMuaraBengkal. Padaindikatorinklusimenunjukkanisustrategis yang dibahasbelummamputerserapsecara optimal kendalanyaadalahpembahasantidakfokus dan selaludibatasiwaktukecenderungan yang munculadalahlebihkepadakuantitasdaripadakualitashasilpembahasanmasihdibutuhkanwaktuuntukmemperdalamisustrategis yang dipalingdibutuhkanmasyarakat. Selanjutnyahasilpenelitian pada indikatorsensitivitasmenunjukkanisusensitivitas yang munculadalah pada saatmusyawarahadadugaanaspirasihanyamewadahikepentingankelompok dan juga terkaittanah yang dijadikantempatpembangunansaranaumum.

**Kata Kunci : Kepemimpinan, Disiplin Kerja**

1. **PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia menerapkan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025 pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam implementasinya mensyaratkan keterlibatan langsung komponen masyarakat penerima program pembangunan. Melalui partisipasi masyarakat ini maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Penyenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat. Program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam rangkaian program-program pembangunan. Pelaksanaan program Pembagunan Berbasis Masyarakat berperan sangat penting dan menentukan kesesuaian potensi sumber daya yang ada sehingga program pembangunan merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui Musrebang menjadi prioritas pembangunan (Sumbi & Firdausi, 2016:42).

Pemerintah menetapkan kegiatan musyawarah pembangunan daerah atau Musrenbang sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada kegiatan ini rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan.

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa atau kelurahan yang akan ditetapkan sebagai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Disamping itu, untuk  membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum memenuhi atau mencakup prioritas kegiatan pembangunan desa atau kelurahan.

Terdapat sejumlahmasalah atau kendala dalam Musrenbang dimana forum Musrenbang selama ini terbukti mengandung sejumlah kelemahan di hampir semua levelnya. Pada level bawah proses musrenbang telah pula mengalami distorsi dalam pelaksanaannya. Kendala utama di tingkat desa atau kelurahan ialah menyangkut kurangnya dilibatkan pelbagai unsur (stakeholders) di tingkat desa ataukelurahan di dalam penyusunan Musrenbang Desa.

Akibat permasalahan tersebut praktek mekanisme musrenbang berpotensi gagal pada tingkat Desa/Kelurahan dalam mencapai tujuan idealnya yaitu untuk menampung dan menetapkan kegiatan yang berada dalam kategori prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya yaitu (Musyawarah Dusun/kelompok)(Mantrawan dkk, 2016:1). Musrenbang desa atau kelurahan hanya disusun oleh sebagian elite di desa/kelurahan tersebut, bahkan di banyak desa hanya melibatkan kepala desa dan sekretaris desa. Dengan demikian, proyek yang diusulkan juga menjadi bias kepentingan elite desa/kelurahan.

Permasalahan lainnya yaitu sebelum musrenbang, terutama dalam melakukan pemetaan para pihak strategis (mapping stakeholder strategic) yang diundang untuk turut berpartisipasi (LSM tidak diikutsertakan), tahapan pelaksanaan dan evaluasinya.Selain itu, kualitas usulan desa pada Musrenbang kecamatan juga sangat lemah. Usulan yang muncul lebih sering hanya pembangunan atau perbaikan jalan, saluran air, dan usulan yang bersifat fisik lainya padalah pembangunan juga memperhatikan aspek lain seperti pemberdayaan atau pembangunan sumberdaya manusianya. Hal menarik lainnya adalah keterlibatan peserta Musrenbang dari kalangan warga masyarakat dengan pejabat/ apatatur atau birokrat dari SKPD terkait tidak terjadi diskusi dalam membahas suatu masalah; pihak birokrat dari SKPD cenderung hanya datang mendengar dan mencatat sebanyak-banyaknya penyampaian atau usulan dari peserta kemudian pulang sehingga tidak terjadi proses pembelajaran demokrasi sebagaimana yang diharapkan (Achmad, 2014:13).

Perencanaan Pembangunan daerah melalui Musrenbang merupakan sarana untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Bottom Up Planning) yang secara mekanisme dan fungsional dengan kegiatan merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah,menggerakan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu dan menumbuhkan kondisi dinamis antara masyarakat (Alam, & Mamu, 2016:96).

Berdasarkan pengamatan penulis pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Muara Bengkal belum mencerminkan musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Selain itu, proses perencanaan pembangunan di Desa Pesanggrahan belum diawali dengan kegiatan identifikasi masalah, potensi, maupun kebutuhan masyarakat secara valid. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang tingkat desa di Desa Pesanggrahan cukup baik namun belum optimal.Hal tersebut terlihat dari usulan-usulan masyarakat yang cukup sulit untuk diakomodir ke tingkat Musrenbang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang mampu mengidentifikasi masalah khusus.

Dalam kegiatanMusrembang menampung dan membahas usulan proyek kegiatan prioritas desa/kelurahan yang diperoleh dari Musrenbang desa/kelurahan. Dalam Musrenbang Kecamatan, tidak muncul usulan proyek kegiatan baru selain usulan dari desa/kelurahan, kecuali usulan baru yang benar-benar prioritas dan atau mendesak untuk dilaksanakan. Merumuskan dan menyepakati serta menetapkan kembali usulan proyek-proyek kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan sesuai dengan prioritas penanganannya serta sumber-sumber pembiayaannya untuk dimusyawarahkan dalam diskusi forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.Menyepakati dan menetapkan Wali Amanah/Delegasi Kecamatan yang akan mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatan pada diskusi forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

Isu-isu strategis yang muncul dalam musrembang yaitu pembangunan infrastruktur desa, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan, ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, pelestarian lingkungan, pengelolaan informasi Desa, penyelenggaraan perencanaan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif, dan isu-isu strategis lainnya yang dapat muncul dalam pembahasan musrembang.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan pembangunan yang dikembangkan pemerintah saat ini adalah perencanaan pembangunan partisipatif dengan menyerap isu-isu starategis di tingkat kecamatan. Pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi.

Penekanan pembangunan partisipatif ini bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada proses pelibatan stakeholders dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat yang muncul dari musrembang.

Sejumlah penelitian terdahulu yang menguraikan pembangunan partisipatif dari pelaksanaan musrembang antara lain Sanjaya (2013), partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan belum berjalan maksimal, karena partisipasi di dalam tahap perencanaan masih rendah karena masyarakat hanya aktif memberikan usulan dan ide saat pra musrenbang, dan masyarakat hanya aktif memberikan kritik dan saran namun kritik yang dilakukan bukan untuk memberikan usulan melainkan untuk mempertanyakan keberadaan pelaksanaan musrenbang yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Selanjutnya penelitian Mustanir (2017), menunjukkan partisipasi masyarakat berada dalam kategori kurang berpartisipasi pada kegiatan musrenbang disebabkan karena Komunitas yang mayoritas di lebih mendengarkan apa yang dikatakan pimpinan komunitas/lembaga adat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibandingkan apa yang di sampaikan kepala kelurahan yang bukan dari Komunitas.

1. **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah Isu-Isu Strategis Pembangunan Partisipatif yang muncul Melalui Musrembang Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur?

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Timur, Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.

analisa data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2015 : 11).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan untuk memperkuat penelitian.

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban atau informasi dari informan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Observasi dalam penelitian dilakukan dalam rangka melihat aktivitas pegawai terkait reformasi administrasi pada bidang pendidikan khususnya di Dinas Pendidikan kabupaten Kutai Timur.

1. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi penelitian.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Isu-isu strategis yang diserap melalui Musrembang dapat membuka lebar peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk mengkaji isu-isu startegis yang muncul dari Musrembang ini dapat terserap secara efektif dan merepresetasikan aspirasi masyarakat.Berdasarkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui Isu-Isu Strategis Pembangunan Partisipatif Melalui Musrembang Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timurmaka penelitian ini meneropong dari sejumlah indikator isu-isu strategis yang dikemukakan Bryson (2004), yaitu aktual, urgensi, kesesuaian, dampak positif, Relevansi, Inklusi, dan Sensitivitas. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut.

* + - 1. **Aktual**

Indikator aktual ini mencakup isu yang menjadi pusat perhatian pemerintah dalam penyelengaraan pembangunan di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Untuk memperoleh gambaran mengenai isu aktual ini maka dilakukan wawancara dengan informan Camat Kecamatan Muara Bengkal yang mengatakan bahwa:

“Pemberdayaan SDM agar masyarakat mampu mandiri mengelola SDA dan di topang infrastruktur yang strategis dan tepat sasaran, Pemberdayaan SDM agar mandiri, berdaya saing di era globalisasi, infastruktur akses jalan ke kota dan ke kebun mesti diperbaiki”

(hasil penelitian Tanggal, 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang mandiri terlebih dahulu mesti ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai di desa seperti pembangunan akses jalan dari kota ke kota sampai ke kebun mesti diperbaiki agar mampu menunjang ekonomi masyarakat.

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur yang mengemukakan bahwa:

“kita yang harus kita pikirkan dengan dilaksanakannya pembangunan yang berimbang secara bertahap dengan sekala prioritas infrstruktur dan pemberdayaan SDM agar bisa mandiri sehinga mampu mengelola SDA yang ada di Kecamatan Muara bengkal”

(hasil penelitian Tanggal, 24 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa diperlukan pembangunan yang berimbang dan bertahap maka yang pertama diprioritaskan adalah pembangunan fisik atau infrastruktur

yang dapat menujang SDM yang ada di Kecamatan Muara Bengkal agar dapat mandiri yang didukung dengan pemberdayaan pengelolaan SDA yang dimiliki masyarakat Kecamatan Muara Bengkal.

Selanjutnya hasil wawancara dengan kepala Desa Senambah, Kecamatan Muara Bengkal yang mengemukakan bahwa:

“Kita mengerti secara riilnya ya, ini karena kita ini mengingat kondisi dan situasi lapangan memang harus membangun dengan sekala prioritas yang bersumber dari Aspirasi Masyrakat, apa yang diinginkan masyarakat semua dimusyawarahkan sehingga kita sama-sama mengerti apa yang penting untuk kondisi saat ini bagi masyarakat adalah pembangunan fisik desa seperti jalan desa”

(hasil penelitian Tanggal, 11Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa secara aktual kondisi masyarakat yang memerlukan pembangunan fisik untuk diproritaskan dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Bengkal hal ini diperoleh dari hasil perumusan musyawarah masyarakat yang keinginan mereka dalam pembangunan desa itu menitikberatkan pada pembangunan fisik seperti jalan desa yang masih perlu diperhatikan bersama pemerintah dan masyarakat.

* + - 1. **Urgensi**

Pada indikator urgensi ini melihat isu yang dinilai mendesak untuk segara diberikan tindakan dalam kaitannya dengan pembangunan di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Untuk memperoleh penjelasan mengenai isu urgensi dalam musyawarah di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur maka dilakukan wawancara dengan informan kepala Desa Batu Balaiyang mengatakan bahwa:

“hal yang menjadi urgensi ya tentu sarana umum seperti puskesmas, jalan, jembatan itu sarana fisik yang paling penting dan urgen kalau tadi istilahnya itu, kita perlu prioritaskan yang betul-betul dibutuhkan dan mendesak karena kalau tidak dipenuhi maka akan mengganggu kehidupan masyarakat”

(hasil penelitian Tanggal, 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat prioritas dalam pembangunan diKecamatan Muara Bengkal yang dinilai memiliki urgensi terutama yang terkait dengan sarana umum seperti sarana kesehatan (puskesmas), jalan, dan jembatan. Untuk memperoleh penjelasan secara utuh dilevel kecamatan maka dapat disajikan data prioritas usulan melalui tabel berikut.

**Tabel 2. Prioritas Usulan Pembangunan di KecamatanMuara Bengkal Kabupaten Kutai Timur**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program & Kegiatan** | **Lokasi Proyek** | **Volume Proyek** | **Sasaran/Manfaat** |
|
|
| Desain Perencanaan Pembangunan RS. Pratama | BENUA BARU | paket | Utk. Kelengkapan Pembangunan |
| Pembangunan Kantor Camat Muara Bengkal | Jln. ABD. HAIB MBU | 120 x 181 m | Utk. Kenyamanan Pelayanan Masyarakat |
| Pembangunan Aula Kantor Camat (Tempat Rapat) | MBU | paket | Utk. Pertemuan/Rapat |
| Pembangunan Pasar | MBU | paket | Utk. Masyarakat |
| Pembangunan Rumah Sakit Pratama | MBU | 1 paket | Utk. Masyarakat |
| Pembangunan Masjid Besar AT-TAQWA | MBU | 1 paket | Sarana Ibadah |
| Lanjutan Rehab Rumah Jabatan Camat | MBU | 1 unit | Tamu-tamu Kabupaten |
| Rehab berat Rumah Dinas Pegawai Kantor Camat | MBU | 8 unit | Utk. Pegawai |
| Pembangunan Gudang Kantor | MBU | 6 x 10 m | Utk Menyimpan barang |
| Pengadaan Mesin Ces BS 18 PK | 7 Desa & Kecamatan | 8 Buah | Utk. keperluan Desa ke Kecamatan musim banjir |
| Pembangunan Gedung PKK Kecamatan | Muara Bengkal | 6 x 10 m | Utk. Kegiatan PKK Kecamatan |
| Pembangunan Gedung UPT. Perpustakaan Kecamatan Muara Bengkal | MBU | 25 x 181 m | Untuk meningkatkan kinerja pegawai |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Operasional Perpustakaan Kec. Muara Bengkal | MBU | 1 Unit | Untuk Operasional di Lapangan |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 Operasional Perpustakaan Kecamatan Muara Bengkal | MBU | 2 Unit | Untuk Operasional di Lapangan |
| Pengadaan Genset Kantor UPT. Perpustakaan 10 KW | MBU | 1 Unit | Untuk Operasional di Kantor |
| Pembangunan Gedung Rawat Inap | MBU | 1 paket | Utk. pasien rawat inap |
| Pemasangan Jaringan Listrik | MBU | 1 paket | Utk. Penerangan |
| Pemasangan Jaringan pipa PDAM | MBU | 1 paket | Utk. Keperluan Air |
| Peningkatan Badan Jalan dari jalan utama menuju ke Puskesmas | MBU | 1 paket | Utk. Masyarakat |
| Pembangunan Gedung Baru Puskesmas | MBU | 120 x 181 m | Utk. Kenyamanan Pelayanan |
| Pengadaan Mesin Genset 10 KW | MBU | 1 unit | Utk. Persiapan Lampu mati |
| Pembangunan gudang di lahan BPP Ma. Bengkal | KM-6 BENUA BARU | 4 x 10 m | Penyimpanan barang BPP |
| Pembangunan rumah dinas kantor BPP | KM-6 BENUA BARU | 8 x 8 m | Untuk Pegawai BPP |
| Peningkatan badan jalan masuk kantor BPP | KM-6 BENUA BARU | paket | Mempermudah menuju kekantor |
| Pengadaan motor dinas PPL | KM-6 BENUA BARU | 9 | Operasional lapangan PPL |
| Kendaraan mobil dinas UPT. BPP | KM-6 BENUA BARU | 1 | Operasional lapangan PPL |
| Pembangunan Jembatan Beton | Desa Mulupan | 1 paket | Untuk Masyarakat |
| Peningkatan Badan Jalan Mulupan – Senambah | Desa Mulupan | 11 km | Untuk Masyarakat |
| Cor Beton Jalan Desa | Desa Senambah | 2000 x 4 m | Untuk Masyarakat |
| Jembatan Beton Sei Sawar Baru | Desa Senambah | 30 x 8 m | Untuk Masyarakat |
| Pembangunan Jembatan Beton Sei Setrawe | Desa Senambah | 1 x 3000 x 6 m | Untuk Masyarakat |
| Turap Uruk dan Paping Blok Masjid Ar Rahman | Desa Senambah | 30 x 20 x 1.5 m | Untuk Masyarakat |
| Pembangunan Jaringan PLN | Desa Senambah | 1 paket | Untuk Masyarakat |
| Jembatan Ulin Jalan Usaha Tani | Desa Senambah | 2 x 300 m | Untuk Masyarakat |
| Semenasi Jalan M. Mansyur | Ngayau | 6 X 6 | Masyarakat |
| Pembangunan Kantor Desa Ngayau | Ngayau | 10 X 10 | Masyarakat |
| Pembangunan Kantor BPD. Desa Ngayau | Ngayau | 10 X 10 | Masyarakat |
| Semenasi Gang Banggeris | Ngayau | 3 x 3 | Masyarakat |
| Cor Beton Jalan Ahmad S Sampai Batas Desa Ngayau | MBI | P:800M/L:8M T:50CM | Masyarakay |
| Pembukaan dan Peningkatan Badan Jalan (di TPA Sampah) | MBU | 8 x 500 m | Rapak Duhung/Masy. |
| Peningkatan Jalan H. Abd. Haib | MBU RT.8 | 1.500 x 8 m |  |
| Peningkatan Jalan Usaha Tani Gg. Masjid AT-Taqwa | MBU RT. 4 | 2 x 400 m | Poktan Rpk. Rumbia |
| Rabat Beton Jalan Akasia | MBU RT. 5 | 6 x 100 x 0,20 m | Masyarakat |
| Cor Beton Jalan Pemilu | Benua Baru | 3500. M |  |
| Cor Beton Jalan Jaya Muda | Benua Baru | 560. M |  |
| Pembangunan Balai Pertemuan | Batu Balai | 1 Paket | Umum |
| Semenisasi Jalan H. Hamiq | Batu Balai | 4x100x0.18 | Umum |
| Pembangunan Kantor PDAM Unit Muara Bengkal | Desa MBI | 6 x 8 m | Pelayanan Masy. |
| Peremajaan Pipa Lama | Muara Bengkal | 6.600 M | Pelayanan Masy. |
| Pipa Pendamping | Jalur SMK dan Ma.Bengkal | 5.500 M | Pelayanan Masy. |
| Pengurukan Halaman Sekolah TK. Pembina | MBU. Jln. H. Abd. Haib | 30 x 50 m |  |
| Ruang Kelas Baru (RKB ) | SDN 003 Desa MBU | 168 m² |  |
| Ruang Kelas Baru (RKB) | SDN 007 MB | 1 Unit 2 Pintu |  |
| Kantor Kepala Sekolah | SDN 008 MB | 10m X 12m = 120m2 |  |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) | SDN 009 MB | 9 x 25 m |  |
| Ruang Kelas Baru (RKB) | SMPN 2 MB | 1 Unit 2 Pintu |  |
| Ruang Kelas Baru (RKB) | SMPN 4 MB | 3 Lokal |  |
| Ruang Kantor | SMPN 4 MB | 1 Paket |  |
| Rumah Dinas | SMPN 4 MB | 3 Unit (6 Pintu) |  |
| Ruang kelas Baru SDN 004 Bertingkat | SDN 004 MB | 9 mx 30 m |  |
| Pembangunan Ruang Kantor SDN 004 | SDN 004 MB | 8mx21m |  |
| Pengurukan dan Pengerasan Hal Kantor | UPT. Pendidikan | 1.706,25 M² |  |
| Gudang Penyimpanan Barang | UPT. Pendidikan | 36² |  |
| Jaringan Listrik Jln. H. Abd. Haib | UPT. Pendidikan |  |  |
| Pembangunan Menara Masjid Aumara Bitaqwa | Desa Mulupan | 1 paket |  |
| Pengadaan Mobil Ambulan Desa | Desa Mulupan | 1 unit |  |
| Pengadaan PLN | Desa Mulupan | 1 paket | Untuk Masyarakat |
| Pengadaan Mobil Ambulance Desa | Ngayau | 1 Unit | Masyarakat |
| Pembangunan Masjid Baru | MBI | 1 paket | Masyarakat |
| Pengadaan Ambulance Desa | MBU | 1 unit | Masyarakat |
| Pembersihan Danau Gelumbang | MBU RT 9 | 1 paket | Masyarakat |
| Rumah Layak Huni | Benua Baru | 175 Unit | Masyarakat |
| Lanjutan Pembangunan Masjid Jami' Darussalam | Batu Balai | 1 Paket | Umum |
| Pembangunan Sekretariat Satu Atap Karang Taruna, Lembaga Adat, LPM dan BPD | Batu Balai | 1 Paket | Sarana Pemerintahan |
| Pembebasan Lahan Untuk SMA | RT. 2 | 2 Ha | Mendekatkan Sarana Pendidikan |
| Pembangunan Rumah Sakit Pratama | BENUA BARU KM-6 | 3 Ha | Umum |
| Pembangunan Masjid Jami' AT-TAQWA | MBU |  | Untuk sarana ibadah |
| Pembangunan Pasar | MBU |  | Masyarakat |
| Pengadaan Pupuk NPK, KCL dan UREA | Benua Baru | 30 Ton | Gapoktan |
| Pagar Sapi Keltan. BUMI | Batu Balai | 700 Meter | Kelompok Peternakan |

Sumber: Data Musrembang Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, 2019.

Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa yang mendominasi kegiatan pembangunan di Desa-Desa yang ada di Muara Bengkal yaitu pembangunan fisik bangunan seperti Pembangunan Aula Kantor Camat (Tempat Rapat), Pembangunan Pasar, Pembangunan Rumah Sakit Pratama, Pembangunan Gedung PKK Kecamatan, Pemasangan Jaringan Listrik, Pemasangan Jaringan pipa PDAM, Peningkatan Badan Jalan dari jalan utama menuju ke Puskesmas, Peningkatan badan jalan masuk kantor BPP, Pembangunan Jembatan Beton, Cor Beton Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Beton Sei Setrawe, dan Pembangunan Balai Pertemuan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai isu yang bersifat urgen ini dikemukakan oleh informan Camat Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur yang mengatakan bahwa:

“masyarakat mengusulkan apa yang dibutuhkannya dan tugas pemerintah memfasilitasi, ntuk infrastruktur fisik sudah pasti jangka panjang, yang belum optimal disini pemberdayaan SDM untuk jangka Panjang, belum ada masyarakat disini dalam kondisi aman hanya focus pembangunan”

(hasil penelitian Tanggal, 11 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa fokus pembangunan saat ini di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur adalah pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang dan memiliki urgensi meskipun pemberdayaan menjadi tidak optimal karena infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat seperti sarana kesehatan, jaringan air, listrik, jalan, jembatan, dan balai pertemuan memiliki urgensi dalam pembangunan desa.

* + - 1. **Relevansi**

Isu ini sesuai kebutuhan konstituen yang diartikan sesuai dengan keinginan masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai isu relevansi ini maka dilakukan wawancara dengan informan MA Tokoh Masyarakat di Kecamatan Muara Bengkal yang mengatakan bahwa:

“yah aspiratif pasti ada prioritas juga, transparan dan terkendali namun apakah ini sesuai dengan keinginan masyarakat mungkin sebagian sajamasih ada juga yang tidak terlaksana secara menyeluruh ada juga kepentingan orang-orang tertentu yang ikut disitu”

(hasil penelitian Tanggal, 24 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa isu pembangunan yang diaspirasikan memiliki kesesuaian dengan prioritas pembangunan desa di Kecamatan Muara Bengkal namun sebagian masyarakat merasa bahwa hanya sebagian yang menyentuh aspirasi masyarakat karena ada kelompok tertentu yang memiliki kepentingan terkait pembangunan di Kecamatan Muara Bengkal.

Selanjutnya informan RA selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Muara Bengkal yang mengatakan bahwa:

“saya rasa ada juga sejumlah hasil rapat yang memiliki kesesuaian seperti pembukaan dan Peningkatan Badan Jalan (di TPA Sampah) sama itu perbaikan Jalan Usaha Tani Gg. Masjid AT-Taqwa inikan memang tidak bisa sekaligus ada tahapan dan tidak semua aspirasi dapat langsung dituntaskan pemerintah juga butuh proses untuk itu”

(hasil penelitian Tanggal, 11 juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa kesesuaian antara realisasi pembangunan dan keinginan masih masyarakat tidak dapat dipenuhi secara menyeluruh tetapi dilakukan dengan proses atau tahapan pembangunan berbagai contoh realisasi pembangunan yang memiliki kesesuaian dengan keinginan masyarakat itu seperti pembuatan jalan menuju TPA dan jalan usaha tani yang dapat dimanfaatkan masyarakat petani secara umum.

* + - 1. **Dampak positif**

Indikator ini melihat isu yang memiliki dampak yang membantu masyarakat di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Untuk memberikan gambaran mengenai dampak positif ini maka dilakukan wawancara dengan MA Selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Muara Bengkalyang mengatakan bahwa:

“Saya rasa dampak positif pasti ada karena inikan betul-betul nyata pembangunannya apalagi pada tahapan perencanaan memberi pengaruh positif karena semua elemen atau unsurmasyarakat kami undang dan dilibatkan untuk merencanakan dan menyampaikan aspirasi meskipun tetap ada ketidakpuasan namun dampaknya positifnya itu pasti ada bagi masyarakat kita”

(hasil penelitian Tanggal, 24 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dampak positif itu ada karena masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa sehingga terbangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakpuasan sejumlah pihak itu pasti ada meskipun pada akhirnya seluruhnya dapat menerima keputusan hasil musyawarah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan kepala Desa Batu BalaiKecamatan Muara Bengkal yang memberikan gambaran tentang dampak positif dari penyelenggaraan Musrembang belia mengemukakan bahwa:

“Nah, yang menjadi persolan itukan pemberdayaan ini karena seperti belum optimal itu karena dalam tahap pembangunan untuk sarana terlebih dahulu ini contohnya pembangunan balai pertemuan dan pembangunan sekretariat satu atap Karang Taruna, Lembaga Adat dan BPD perlu dulu diprioritaskan sarananya supaya pemberdayaan masyarakat disitu bisa berjalan”

(hasil penelitian Tanggal, 24 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dampak positif dalam musyawarah perencanaan pembangunan ini memberikan prioritas utama pembangunan sarana terlebih dahulu sebagai tempat pemberdayaan masyarakat itu dapat dilakukan sebagai contoh pembangunan Balai Pertemuan diDesa Batu Balai setelah Balai tersebut dibangun maka diharapkan dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pertemuan dan menghadiri kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun LSM.

1. **Kesesuaian**

Indikator ini menguraikan kesesuaian isu yang memiliki kesesuaian dengan visi & misi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur. Untuk menguraikan hal tersebut maka informan yang dinilai lebih relevan adalah kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur yang mengemukakan bahwa:

“iya, kita berusaha untuk menyesuaikan dengan visi misi kabupaten namun karena sebagian yang belum terealisasi, maka akan kita bahas kembali dalam musrenbang pada tahun berikutnya dengan skala prioritas, dalam kegiatan musrenbang kami melibatkan semua OPD, SKPD, elemen masyarakat, sejauh ini tidak ada kendala yang serius dalam pelaksanaan musrenbang”

(hasil penelitian Tanggal, 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa keterlibatan sejumlah OPD atau SKPD merupakan upaya pemerintah daerah dalam menyelaraskan visi misi kabupaten dalam penyelenggaraan Musrembang di Kecamatan Muara Bengkal namun pemerintah sebatas memfasilitasi dan mengarahkan Musrembang agar berjalan lancar dan aspirasi tetap dari masyarakat kemudian pemerintah daerah melalui SKPD yang terlibat mengontrol realisasi dari perencanaan pembangunan di Kecamatan Muara Bengkal.

Selanjutnya hasil wawancara dengan CamatKecamatan Muara Bengkalyang mengemukakan bahwa:

“saya rasa visi misi dari kabupaten juga menekankan untuk pembangunan yang perlu diprioritaskan ini ada relevansi dengan kebutuhan masyarakat yang memang masih menginginkan pembangunan lebih ditingkatkan lagi pemerintah kabupaten tentu mereka tugasnya memfasilitasi kegiatan musyawarah pembangunan ini”

(hasil penelitian Tanggal, 11 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa visi misi kabupaten selaras dengan upaya masyarakat dalam pembangunan yang lebih didominasi pembangunan sarana prasarana atau pembangunan fisik oleh karena itu dapat dikatakan bahwa isu pembangunan di Kecamatan Muara bengkal berkesesuaian dengan visi misi kabupaten yang masih memprioritaskan pembangunan yang merata yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Muara Bengkal.

1. **Inklusi**

Indikator inklusi menguraikan tentang isu strategis yang melibatkan masyarakat dalam program kerjanya yang telah dicanangkan. Untuk memperoleh uraian tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan RA selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Muara Bengkal yang mengatakan bahwa:

“dari prosedurnya melibatkan masyarakat ketika mengadakan masyawarah namun harus mampu mengali aspirasi dan gagasan dari Seluruh komponen masyarakat.. sehingga keluarnya perencanaan yang lebih baik dan bisadi jalankan/direalisasikan dengan kondisi yang ada… intinya disesuaikan dengan Sikon danaturan yang sudah ada”

(hasil penelitian Tanggal, 11 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa isu strategis yang dibicarakan belum menyerap seluruh aspirasi seluruh komponen masyarakat namun secara prosedural di dalam musyawarah dikatakan telah melibatkan masyarakat masih diperlukan upaya dan waktu yang lebih untuk menggali aspirasi masyarakatKecamatan Muara Bengkal.

Hal yang senada juga dikemukakan dalam hasil wawancara dengan informan kepala Desa Senambah yang mengatakan bahwa:

“Penyerapan aspirasi dari yang paling bawah( Akarrumput ) yang tidak bisa terserap dengan maksimal bahkan tidak dilaksanakan penyerapan.Terkendaladengantidak focus dan selalu dibatasi dengan waktulebih ke Kuantitas daripada Kualitas, harusPunyaBanyakwaktusehinggapembahasan menjadi lebih sempurna”

(hasil penelitian Tanggal, 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa isu strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Muara Bengkal belum mampu terserap secara optimal kendala yang ditemui adalah pembahasan tidak fokus dan selalu dibatasi waktu kecenderungan yang muncul adalah lebih kepada kuantitas daripada kualitas hasil pembahasan masih dibutuhkan waktu untuk memperdalam isu strategis yang dipaling dibutuhkan masyarakat.

1. **Sensitivitas**

Indikator ini mengemukakan isu yang dapat meredam dampak konflik pada masyarakat di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Untuk menguraikan lebih lanjut mengenai isu sensitivitas ini maka dilakukan wawancara dengan informan MA Selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Muara Bengkal yang mengatakan bahwa:

“biasanya yang menjadi persoalan itu kalau ada yang merasa aspirasi mereka hanya kurang diterima secara menyeluruh dugaan bahwa hanya mewadahi kepentingan kelompok tertentu ini selalu mewarnai masyawarah kita namunkan pada akhirnya nanti selalu dikatakan bahwa aspirasi tidak dapat ditampung semua”

(hasil penelitian Tanggal, 24 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa isu sensitivitas yang muncul adalah pada saat musyawarah ada dugaan aspirasi hanya mewadahi kepentingan kelompok tertentu tidak merangkul kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan pada akhirnya alasan yang dapat diterima adalah aspirasi tidak dapat ditampung semua dan dilaksanakan sekaligus.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan kepala Desa Batu Balai yang mengatakan bahwa:

“persoalan tanah yang digunakan untuk membangun misalnya itu kadang menjadi isu yang sensitif karena mesti betul-betul matang perencanaannya dan semua pihak mesti menerima kemudian yang paling penting tidak menimbulkan konflik dikemudian hari jangan sampai oke sekarang tapi dibelakang baru diperdepatkan lebih dari awal kita matangkan”

(hasil penelitian Tanggal, 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa isu yang sensitif memerlukan perencanaan yang matang terutama terkait tanah yang dijadikan tempat pembangunan sarana umum mesti tuntas pembahasannya jangan sampai menimbulkan permasalahan dikemudian hari oleh karena itu pembahasan terkait isu tersebut betul-betul mesti melibatkan seluruh pihak yang terlibat agar potensi konflik dapat diredam lebih awal.

Dari keseluruhan hasil penelitian ini terkait Isu-Isu Strategis Pembangunan Partisipatif Melalui Musrembang Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur yang dianalisis melalui indikator indikator isu-isu strategis yang dikemukakan Bryson (2004), yaitu aktual, urgensi, kesesuaian, dampak positif, Relevansi, Inklusi, dan Sensitivitas menunjukkan bahwa keterkaitan isu-isu tersebut dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif di Kecamatan Muara Bengkal.

Secara aktual kondisi masyarakat yang memerlukan pembangunan fisik untuk diproritaskan dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Bengkal hal ini diperoleh dari hasil perumusan musyawarah masyarakat yang keinginan mereka dalam pembangunan desa itu menitikberatkan pada pembangunan fisik seperti jalan desa yang masih perlu diperhatikan bersama pemerintah dan masyarakat diperlukan pembangunan yang berimbang dan bertahap maka yang pertama diprioritaskan adalah pembangunan fisik atau infrastruktur yang dapat menujang SDM yang ada di Kecamatan Muara Bengkal agar dapat mandiri yang didukung dengan pemberdayaan pengelolaan SDA yang dimiliki masyarakat Kecamatan Muara Bengkal.

Dari sisi urgensi, terdapat prioritas dalam pembangunan diKecamatan Muara Bengkal yang dinilai memiliki urgensi terutama yang terkait dengan sarana umum seperti sarana kesehatan (puskesmas), jalan, dan jembatan.Fokus pembangunan saat ini di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur adalah pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang dan memiliki urgensi meskipun pemberdayaan menjadi tidak optimal karena infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat seperti sarana kesehatan, jaringan air, listrik, jalan, jembatan, dan balai pertemuan memiliki urgensi dalam pembangunan desa.

Selanjutnya dari indikator relevansi menunjukkan isu pembangunan yang diaspirasikan memiliki kesesuaian dengan prioritas pembangunan desa di Kecamatan Muara Bengkal namun sebagian masyarakat merasa bahwa hanya sebagian yang menyentuh aspirasi masyarakat karena ada kelompok tertentu yang memiliki kepentingan terkait pembangunan di Kecamatan Muara Bengkal. Kesesuaian antara realisasi pembangunan dan keinginan masih masyarakat memang tidak dapat dipenuhi secara menyeluruh tetapi dilakukan dengan proses atau tahapan pembangunan berbagai contoh realisasi pembangunan yang memiliki kesesuaian dengan keinginan masyarakat itu seperti pembuatan jalan menuju TPA dan jalan usaha tani yang dapat dimanfaatkan masyarakat petani secara umum.

Kemudian dampak positif yang dapat dicermati yaitumasyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa sehingga terbangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakpuasan sejumlah pihak itu pasti ada meskipun pada akhirnya seluruhnya dapat menerima keputusan hasil musyawarah. Musrembang ini memberikan prioritas utama pembangunan sarana terlebih dahulu sebagai tempat pemberdayaan masyarakat itu dapat dilakukan sebagai contoh pembangunan Balai Pertemuan di Desa Batu Balai setelah Balai tersebut dibangun maka diharapkan dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pertemuan dan menghadiri kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun LSM.

Pada indikator kesesuaian visi misi menunjukkan keterlibatan sejumlah OPD atau SKPD merupakan upaya pemerintah daerah dalam menyelaraskan visi misi kabupaten dalam penyelenggaraan Musrembang di Kecamatan Muara Bengkal namun pemerintah sebatas memfasilitasi dan mengarahkan Musrembang agar berjalan lancar dan aspirasi tetap dari masyarakat kemudian pemerintah daerah melalui SKPD yang terlibat mengontrol realisasi dari perencanaan pembangunan di Kecamatan Muara Bengkal.

Visi misi kabupaten selaras dengan upaya masyarakat dalam pembangunan yang lebih didominasi pembangunan sarana prasarana atau pembangunan fisik oleh karena itu dapat dikatakan bahwa isu pembangunan di Kecamatan Muara bengkal berkesesuaian dengan visi misi kabupaten yang masih memprioritaskan pembangunan yang merata yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Muara Bengkal.

Selanjutnya hasil penelitian pada indikator inklusi menunjukkan isu strategis yang dibicarakan belum menyerap seluruh aspirasi seluruh komponen masyarakat namun secara prosedural di dalam musyawarah dikatakan telah melibatkan masyarakat masih diperlukan upaya dan waktu yang lebih untuk menggali aspirasi masyarakat Kecamatan Muara Bengkal. Isu strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Muara Bengkal belum mampu terserap secara optimal kendala yang ditemui adalah pembahasan tidak fokus dan selalu dibatasi waktu kecenderungan yang muncul adalah lebih kepada kuantitas daripada kualitas hasil pembahasan masih dibutuhkan waktu untuk memperdalam isu strategis yang dipaling dibutuhkan masyarakat.

Selanjutnya hasil penelitian pada indikator sensitivitas menunjukkan isu sensitivitas yang muncul adalah pada saat musyawarah ada dugaan aspirasi hanya mewadahi kepentingan kelompok tertentu tidak merangkul kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan pada akhirnya alasan yang dapat diterima adalah aspirasi tidak dapat ditampung semua dan dilaksanakan sekaligus. Isu yang sensitif memerlukan perencanaan yang matang terutama terkait tanah yang dijadikan tempat pembangunan sarana umum mesti tuntas pembahasannya jangan sampai menimbulkan permasalahan dikemudian hari oleh karena itu pembahasan terkait isu tersebut betul-betul mesti melibatkan seluruh pihak yang terlibat dan dibahas secara tuntas.

**V.** **KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Isu-Isu Strategis Pembangunan Partisipatif Melalui Musrembang Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, dapat ditarik kesimpulan bahwaSecara aktual kondisi masyarakat yang memerlukan pembangunan fisik untuk diproritaskan dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Bengkal hal ini diperoleh dari hasil perumusan musyawarah masyarakat yang keinginan mereka dalam pembangunan desa itu menitikberatkan pada pembangunan fisik. Dari sisi urgensi, terdapat prioritas dalam pembangunan di Kecamatan Muara Bengkal yang dinilai memiliki urgensi terutama yang terkait dengan sarana umum fokus pembangunan saat ini di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur adalah pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang dan memiliki urgensi meskipun pemberdayaan menjadi tidak optimal karena infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat seperti sarana kesehatan, jaringan air, listrik, jalan, jembatan, dan balai pertemuan memiliki urgensi dalam pembangunan desa. Selanjutnya dari indikator relevansi menunjukkan isu pembangunan yang diaspirasikan memiliki kesesuaian dengan prioritas pembangunan desa di Kecamatan Muara Bengkal. Kemudian dampak positif yang dapat dicermati yaitu masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa sehingga terbangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada ketidakpuasan sejumlah pihak. Pada indikator kesesuaian visi misi menunjukkan keterlibatan sejumlah OPD atau SKPD merupakan upaya pemerintah daerah dalam menyelaraskan visi misi kabupaten dalam penyelenggaraan Musrembang di Kecamatan Muara Bengkal SKPD yang terlibat mengontrol realisasi dari perencanaan pembangunan di Kecamatan Muara Bengkal. Selanjutnya hasil penelitian pada indikator inklusi menunjukkan isu strategis yang dibahas belum mampu terserap secara optimal kendala yang ditemui adalah pembahasan tidak fokus dan selalu dibatasi waktu kecenderungan yang muncul adalah lebih kepada kuantitas daripada kualitas hasil pembahasan masih dibutuhkan waktu untuk memperdalam isu strategis yang dipaling dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya hasil penelitian pada indikator sensitivitas menunjukkan isu sensitivitas yang muncul adalah pada saat musyawarah ada dugaan aspirasi hanya mewadahi kepentingan kelompok. Isu yang sensitif memerlukan perencanaan yang matang terutama terkait tanah yang dijadikan tempat pembangunan sarana umum mesti tuntas pembahasannya.

* 1. **Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

* + - 1. Dalam pembahasan yang dikemukakan dalam musyawarah perlu memperhatikan waktu yang digunakan namun yang paling utama adalah kepuasan semua pihak yang terlibat untuk itu perlu kebijakan perpanjangan waktu Musrembang agar semua pihak dapat menyampaikan aspirasinya dengan utuh.
      2. Program pemberdayaan dapat dilaksanakan setelah sarana balai pertemuan telah selesai dibangun namun pemberdayaan lainnya seperti pelatihan kelompok tani dan sarana pembinaan masyarakat seperti sarana olahraga perlu diperhatikan oleh seluruh komponen masyarakat di Kecamatan Muara bengkal Kabupaten Kutai Timur.
      3. Ringkasan poin-poin hasil musyawarah sebaiknya ditempel di papan pengumuman kecamatan dan di desa agar masyarakat dapat mengontrol bersama-sama pembangunan di Kecamatan Muara bengkal Kabupaten Kutai Timur.

**BIBLIOGRAFI**

Achmad, M. A. (2014). Strategi Perencanaan Partisipatif Musrenbang Kota Makassar. Makassar: Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Adisasmita, R. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Alam, A. S., & Mamu, A. (2016). Isu-Isu Strategis dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia, 9(2), 95-102.

Asariansyah, M. F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1141-1150.

Arikunto, S. (2002). Metode penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Bryson, J. M. (1999). Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Jakarta : Pustaka Pelajar.

Bryson, J. M. (2004). Strategic planning for public and nonprofit organizations. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.

Djoeffan, S. H. (2002). Strategi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Di Indonesia. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 18(1), 54-77.

Dodson, M., & Smith, D. E. (2003). Governance for sustainable development: Strategic issues and principles for Indigenous Australian communities. ANU, Centre for Aboriginal Economic Policy Research (CAEPR).

Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal, 2(2).

Lumintang, J. (2015). Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Kemajuan Pembangunan Masyarakat di Desa Tara-Tara I. Jurnal Acta Diurna, 4(2).

Ma’rif, S., Nugroho, P., & Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Semarang. Riptek, 4(11), 53-62.

Mantrawan, I. P. W., Noak, P. A., & Erviantono, T. (2016). Peran Elit Desa dalam Partisipasi di Tingkat Lokal dalam Perumusan Musrembang di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Bali, Indonesia, 1-8.

Monique, S. (2004). Participant of Sport. London: WB. Sauders, Company.

Mustanir, A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. JPP (Jurnal Politik Profetik), 5(2), 247-261.

Rasyid, A. (2017). Perubahan Sosial Dan Strategi Komunikasi (Efektifitas Dakwah Dalam Pembangunan Sosial). Ponorogo, WADE Publish.

Rostanti, M. 2008. Mewujudkan Anggaran Pro Rakyat Miskin: Manual Advokasi Masyarakat Sipil Dalam Siklus Anggaran Daerah.

Rusli, S. D. (2017). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4(1), 1-14.

Rustiadi E, Sunsun Saefulhakim, Dyah R.P. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crespet Press dan Yayasan Obor Indonesia.

Sanjaya, R. T. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara. Katalogis, 1(7).

Sanusi, B. (2004). Pengantar Ekonomi Pembangunan, cetakan Pertama, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sari, I. P. (2016). Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara). Jurnal Ekonomi UHO, 1(1).

Sondang, P. S. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi.

Stiglitz, J. E. (2002). Towards a new paradigm for development: strategies, policies and processes.

Sudarwato, A. L. (2010). Peran strategis perempuan dalam pengelolaan limbah padat bernilai ekonomi. Jurnal ekosains, 2(1).

Sugiyono. (2017). Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D. Alfabeta, Bandung.

Sumbi, K., & Firdausi, F. (2016). Analisis Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Pengembangan Sumber Daya Masyarakat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5(2).

Wulansari, T. A. (2015). Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) TAHUN 2013-2019. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 4(3).